



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KADARUSTAMAJI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 645189

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.372.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/102 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
240.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KUDUS, WARISAN Rp. 170.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 522.100.000
5. Tanah Seluas 90 m2 di KUDUS, WARISAN Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 154.000.000

1. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
4. MOTOR, HONDA PRIMA Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
5. MOTOR, HONDA CB 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000
6. MOBIL, FORD EVEREST Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.856.678
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.576.456.678
III. HUTANG	Rp.	202.270.276
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.374.186.402

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.